

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut (Subaweh dan Nugraheni 2008), “Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporanper tanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah diIndonesia. Dalam hal menjalankan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah Kepala. Selain itu, dalam Peraturan

Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, menyatakan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik tersebut dibutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan keuangan yang *accountable* dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan dan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terbitnya SAP untuk dapat mewujudkan otonomi daerah yang lebih baik, juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat diterima umum seperti yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Banyaknya regulasi saat ini baik pemerintah pusat maupun daerah, baik ditingkat Kementerian

maupun tingkat SKPD dituntut adanya 2 (dua) jenis pertanggungjawaban, yaitu: pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kinerja. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jefri Fanuel Motos, Jantje J. Tinangon, Jessy Warogan (2020) yang berjudul “analisis penerapan standar akuntansi untuk belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado” menjelaskan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Manado sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Manado telah melaksanakan penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk pengeluaran (realisasi biaya), dan peraturan berbasis akrual telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 64 tahun 2013.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri (2014) yang berjudul “Penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Pendapatan, Belanja dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013. Berdasarkan penelitian ini, evaluasi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jln.S.K.Lerik Kelapa Lima Kupang NTT merupakan salah satu pengguna anggaran sekaligus penanggungjawab laporan keuangan atas realisasi anggaran untuk belanja. Belanja dibagi menjadi dua yakni belanja langsung dan tidak langsung dalam penerapannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan belanja langsung. Kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian direvisi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintah

berbasis akrual ini harus adanya evaluasi langkah perubahan yang lebih baik lagi, diperlukan adanya kesadaran bagi pemerintah daerah terkait sehingga otonomi daerah berjalan lebih optimal dan pendapatan belanja daerah dapat dipergunakan dan dikeluarkan dalam setiap pembangunan daerah sebaik mungkin sesuai SAP yang berlaku. Dalam menerapkan Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adapun masalah atau kendala yang dihadapi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah berubahnya sistem penyusunan anggaran, teknik pencatatan akuntansi yang dilakukan masih belum stabil dimana dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pencatatan dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Berbeda dengan teknik pencatatan transaksi berbasis kas dimana pencatatan yang dilakukan hanya mencatat transaksi jika ada pengeluaran atau penerimaan kas, serta penyusunan standar yang tidak independen. Dari permasalahan yang ada maka penulis tertarik menganalisis sejauh mana penerapan standar akuntansi yang diterapkan apakah oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku maka dilakukan penelitian berjudul **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL UNTUK BELANJALANGSUNG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dirumuskan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual untuk belanja langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Persoalan Penelitian

Adapun persoalan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual untuk belanja langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian

➤ Tujuan Penelitian

Dari persoalan penelitian diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual untuk belanja langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

➤ Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat ini dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam menganalisis penerapan standar

akuntansi pemerintah berbasis akrual untuk belanja langsung sesuai peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, sumber informasi dan sebagai pembanding perkembangan ilmu lebih lanjut baik untuk sektor pemerintahan, penulis bahkan pembaca mengenai penerapan standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual untuk belanja langsung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku